

TESIS

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS



Oleh :

NOVITA SARI
NIM. 1620215320044

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**NOVITA SARI
NIM. 1620215320044**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**JUDUL : PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM
INDIKASI GEOGRAFIS**

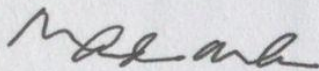
NAMA : NOVITA SARI

NIM : 1620215320044

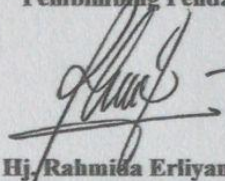
**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418198603 1 002**



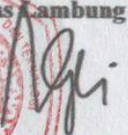
**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420200312 2 002**

Diketahui,

Koordinator


**Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



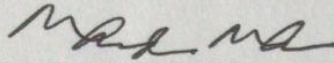

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

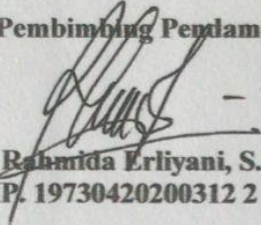
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418198603 1 002**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420200312 2 002**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novita Sari
NIM : 1620215320044
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Novita Sari

SARI, NOVITA. 2023 “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Indikasi Geografis”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 101 Halaman.

RINGKASAN

Perlindungan hukum IG di atur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Wujud perlindungan hukum adalah dengan pendaftaran IG kepada Pemerintah (Menteri). Pendaftaran IG bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas IG dan dialah yang secara eksklusif dapat memakai IG tersebut. IG ada suatu produk yang khas dan hanya ada pada satu daerah geografis tertentu “selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis itu masih ada, Indikasi Geografis bisa menjadi salah satu alat pelindung yang ampuh untuk mencegah terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual pada produk khas asli daerah.

Pasal 53 UU No. 20 Tahun 2016 di atas bahwa dalam rangka perlindungan terhadap indikasi geografis diajukan permohonan kepada Menteri. Pemohon adalah lembaga yang mewakili masyarakat dan pemerintah daerah di kawasan geografis dari barang dan/atau produk yang didaftarkan. Sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Selatan meskipun para pengusaha yang menjalankan usahanya dalam memproduksi produk dagangannya sudah dapat dikatakan mempunyai pasaran yang luas dan banyak memiliki kekayaan intelektual dari sisi produk berpotensi Indikasi Geografis, padahal di Provinsi Kalimantan Selatan banyak yang khas dan tidak sama dengan daerah lain seperti tanaman khas lahan basah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala yaitu padi siam mutiara, padi siam saba, jeruk siam Banjar dan nenas Tamban, langsung tanjung, beras unus, cabe hiung, limau matang, kasturi, durian, ikan saluang, madu, tabat barito, pasak bumi dan khas Kalimantan Selatan lainnya

namun banyak yang belum didaftarkan kekayaan intelektual berupa Indikasi Geografis ini baik oleh lembaga yang mewakili masyarakat atau pemerintah daerah yang memiliki kepentingan atas produk yang bersangkutan.

Pengetahuan mengenai manfaat indikasi geografis serta koperasi yang menjadi wadah produsen banyak yang tidak aktif lagi, sehingga menjadi kendala bagi produsen dalam mengajukan pendaftaran indikasi geografis. Hal yang perlu untuk dilakukan penelitian adalah apakah akibat hukum adanya pendaftaran indikasi geografis produk produsen Kalimantan Selatan yang di daftarkan oleh produsen dari daerah lain dan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis.

Urgensi perlindungan hukum dan pengembangan terhadap potensi IG dikarenakan, pertama: IG merupakan jenis HKI berbasiskan potensi sumber daya alam, yang ruang lingkupnya sangat luas seperti pertanian- perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kerajinan tangan tertentu yang bahan bakunya bersumber dari alam yang memiliki karakteristik tertentu, memiliki reputasi dapat di lindungi dengan IG yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat dalam tataran lokal, nasional dan juga internasional. Jika dikelola dan dikembangkan secara baik akan melahirkan kekuatan ekonomi bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam. Kedua: IG merupakan konsep HKI yang bersifat kolektif sehingga perlindungan hukum dan pengembangannya menuntut kerjasama semua elemen, baik itu pemerintah daerah selaku regulator melalui dinas-dinas terkait, kalangan pengusaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan juga kelompok masyarakat. Ketiga: pentingnya perlindungan IG mengingat sebelumnya telah banyak kasus pelanggaran IG yang dilakukan melalui praktik bisnis curang telah mengakibatkan kerugian bagi para pemangku kepentingan di dunia bisnis.

Mekanisme pendaftarannya kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 tentang IG. Luasnya ruang lingkup IG kemudian diakomodir juga di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perkebunan juncto PP Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL). Keseriusan perlindungan hukum dan pengembangan IG itu kemudian pada tahun 2011

dibuatlah Memorandum Of Understanding (MOU) antara 3 (tiga) menteri yaitu menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis Bidang Pertanian. Kemudian dikeluarkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

SARI, NOVITA. 2023. “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Indikasi Geografis”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 104 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis.

Tesis yang berjudul Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Indikasi Geografis adalah bertujuan Untuk menganalisis pihak pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pendaftaran indikasi geografis. Untuk menganalisis akibat hukum adanya pendaftaran indikasi geografis produk produsen dari suatu daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

Hasil yang diperoleh adalah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan di bidang pertanian, industri dan sumber daya alam, sehingga terkait dengan bidang tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap IG berupa pengembangan dan perlindungan hukum terhadap IG dan Perlindungan hukum di sini adalah dengan didaftarkan sampai dengan terbitnya sertifikat IG yang memberikan perlindungan dengan mempunyai hak eksklusif sehingga pemegang IG dijamin keasliannya dan hal ini memberikan dampak positif dari pengembangan ekonomi daerah.

SARI, NOVITA. 2023 “The Role of Local Government in Legal Protection of Geographical Indications”. *Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. and Advisor II: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 104 Pages.*

ABSTRACT

Keywords: *Local Government, legal protection, geographical indication.*

The thesis entitled The Role of Local Government in the Legal Protection of Geographical Indications is aimed at analyzing local government parties who have an interest in the registration of geographical indications. To analyze the legal consequences of the registration of geographical indications of producer products from an area. The method used is normative legal research, namely a type of legal research obtained from literature studies, by analyzing a legal issue through statutory regulations, literature and other reference materials related to the problem.

The results obtained are that the Regional Government has authority in the fields of agriculture, industry and natural resources, so that related to these fields it is the responsibility of the local government to provide guidance on GIs in the form of development and legal protection for GIs and legal protection here is by being registered until the issuance GI certificates provide protection by having exclusive rights so that GI holders are guaranteed authenticity and this has a positive impact on regional economic development.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur kepada Allah SWT atas berkat, bimbingan dan kasih karunia-NYA yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Tesis yang berjudul **“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Indikasi Geografis”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa maupun dari segi teknis penulisan.

Dalam Rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadinn Muhjad, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama proses penulisan tesis ini;
2. Bapak / Ibu Dosen Tim Penguji Tesis yang sangat saya hormati atas arahan dan bimbingannya selama Ujian Tesis.
3. Bapak / Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mentransferkan ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir selama perkuliahan.
4. Bapak / Ibu staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. keluarga besar yang telah mendukung dalam doa serta demi kelancaran penulisan tesis ini.

6. Rekan–rekan Seluruh Angkatan tahun 2016 Program Pascasarjana Program Magister
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin .

Semoga atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah
SWT, akhir cerita penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Banjarmasin, Februari 2023

Novita Sari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 5
	C. Keaslian Penelitian 5
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
	E. Tinjauan Pustaka 7
	F. Metode Penelitian 43
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 46
BAB II	RELEVANSI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS 48
	A. Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Indikasi Geografis 48
	B. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Indikasi Geografis 58
	C. Fungsi Pemerintahan tentang Perlindungan Indikasi Geografis 67
BAB III	AKIBAT HUKUM DARI PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS 79
	A. Kedudukan Sertifikasi Indikasi Geografis 79
	B. Implikasi hak eksklusif bagi Indikasi Geografis 85
	C. Dampak ekonomi terhadap Indikasi Geografis yang sudah terdaftar 94
BAB IV	PENUTUP 104
	A. Kesimpulan 104
	B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	